

Moderasi Beragama Berbasis Humanisme Religius untuk Menyikapi Politik Identitas bagi Mahasantri di Perguruan Tinggi Pesantren Jember

Noga Riza Faisol

Institut Agama Islam Al-Qodiri Jember, Indonesia, Email: nogarizafaisol@gmail.com

Abstract: Pondok Pesantren (PP) is the first traditional Islamic educational institution in Indonesia. In the run-up to elections, PP often becomes a political commodity and a target planted to get votes and have a boarding school, where many students live in Islamic boarding schools (mahasantri). The focus of this research is how to internalize the values of religious moderation based on religious humanism in responding to identity politics for students of the IAI Al-Qodiri Jember Islamic Education Study Program? And to describe the focus of the research, the researcher used a qualitative research method with a phenomenological approach, Purposive Sampling was used to determine informants and data analysis used interpretive phenomenological analysis (IPA). From the use of the above method, the research results show that: Internalization of religious moderation values based on religious humanism in responding to identity politics for students of the IAI Al-Qodiri Jember Islamic Religious Education Study Program through 1) vision and mission, 2) curriculum and 3) interaction social.

Keywords: Mahasantri, Religious Moderation, Identity Politics

DOI: [10.58577/dimar.v6i1.260](https://doi.org/10.58577/dimar.v6i1.260)

 OPEN ACCESS

DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam

Open access under [Creative Commons Attribution 4.0 International Licence](#).

(CC-BY) 

PENDAHULUAN

Indonesia bukanlah negara agama (religious-state)¹, melainkan negara bangsa (nation-state). Pada awal kemenangan Indonesia, kontribusi PP sangat terasa, khususnya di ranah perpolitikan². Menjelang pemilu, PP sering menjadi komoditas politik dan sasaran empuk untuk mendapatkan suara³. Namun, kontestasi politik juga memiliki dampak negatif, salah satunya munculnya faksi politik yang melenceng dari visi negara⁴, seperti politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Pemilu 2014, dan 2019⁵, yang tidak sesuai dengan ideologi politik Indonesia, yakni Pancasila⁶. Moderasi dalam beragama, termasuk dalam berpolitik⁷, merupakan karakter yang melekat pada penghuni PP, termasuk mahasantri. CNN Indonesia melaporkan bahwa politik identitas sering dilakukan karena murah, efektif dalam memobilisasi massa, terutama dari segmen Islam.

Dari perspektif humanisme religius, manusia (al-insan) dengan nilai dan kebebasan melihat visi Allah, serta penggambaran kuasa Allah, memberikan jalan agar visi tersebut tercapai⁸. Selain itu, ada tiga dimensi penting: dimensi esensial berupa keimanan, dimensi formatif berupa ritual keagamaan, dan dimensi ekspresif berupa hubungan antara individu atau kelompok manusia dengan makhluk lain. Ketiga dimensi tersebut menjadi landasan untuk menjaga moralitas dalam kehidupan.

Pondok Pesantren (PP) adalah lembaga pendidikan Islam tradisional pertama di Indonesia⁹. Saat ini, terjadi kolaborasi antara sistem PP dan sistem madrasah (lembaga formal), yang berdampak pada kemajuan di PP, di antaranya terdapat pilihan pendidikan dari jenjang Raudlatul Athfal hingga perguruan tinggi.¹⁰ Santri tidak harus keluar dari PP untuk melanjutkan studi ke jenjang S-1 hingga S-3. Mereka dapat melanjutkan pendidikan formal di perguruan

¹ Bayu Karunia Putra and Iradhad Taqwa Sihidi, "Keterlibatan Negara Dan Masyarakat Sipil Dalam Proses Menuju Demokratisasi Di Indonesia," *Hukum Responsif* 13, no. 2 (2022): 69, <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7360>.

² Fauzan Akmal Firdaus and Husni Husni, "Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren Dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas," *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2021): 83, <https://doi.org/10.36667/taf.v15i1.703>.

³ Dany Try Utama Hutabarat et al., "Pendidikan Pancasila: Negara, Agama, Dan Warga Negara," *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022): 1-14, <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i1.202>.

⁴ Firman Panjaitan and Novi Aling Purba, "Dialog Kehidupan Ayub Memproklamkan Kemahakuasaan Allah Dalam Bentuk Keadilan Dan Kebenaran," *Jurnal Efata Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 8, no. 1 (2022): 36-48, <https://doi.org/10.47543/efata.v8i1.49>.

⁵ Firmada Taufiq and Ayu Maulida Alkholid, "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021): 134-47, <https://doi.org/10.21580/jid.v41i2.9364>.

⁶ None Anang Dony Irawan, None Lady Nur Adibah, and None Dyonny Infans Viri Toniek, "Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia," *Pacific Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023): 11-21, <https://doi.org/10.36456/p.v3i1.7191>.

⁷ Mahpudin, "Kebangkitan Politik Identitas Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia Pasca Orde Baru," *Jurnal Sosial Politik* 7, no. 2 (2021): 148-60, <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>.

⁸ Mahpudin.

⁹ Muslimin Ritonga and Raegen Harahap, "Keterlibatan Selebriti Pasca Parliamentary Threshold Dalam Kontestasi Politik Elektoral Di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 3 (2023): 238-45, <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3320>.

¹⁰ Mukhoyyaroh, Nurul Badi', and Iskandar Yusuf. 2024. "Implementasi Pendidikan Karakter Kemandirian Di Ponpes Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan". *Journal of Educational Research and Practice* 2 (1). Tulungagung, Indonesia:30-38. <https://doi.org/10.70376/jerp.v2i1.88>.

tinggi yang ada di dalam PP, yang disebut perguruan tinggi pesantren (PTS), dan menjadi mahasiswa santri (mahasantri).¹¹

Sebagai data awal, Pondok Pesantren Al-Qodiri di Jember memiliki perguruan tinggi pesantren, di mana banyak mahasiswanya yang tinggal di pesantren (mahasantri). PP Al-Qodiri adalah pesantren terbesar di Kabupaten Jember, dan sering menjadi tujuan elit politik saat berkunjung ke daerah Tapal Kuda, seperti Prabowo Subianto, Zulkifli Hasan, Puan Maharani, AHY, dan Kaesang. Uniknya, di PP IAI Al-Qodiri, putra kedua pengasuh pesantren, Ahmad Fadil Muzakki Syekh, merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, dan alumni PP, Muhammad Fawait, menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur. Selain itu, banyak alumni PTS IAI Al-Qodiri Jember, khususnya dari Prodi PAI, yang menjadi calon legislatif (Caleg) Pemilu 2024, terutama di tingkat DPRD Kabupaten.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan bagaimana PTS dalam menyikapi politik identitas bagi mahasantrinya agar dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi lain khususnya PTS untuk diimplementasikan dimasing-masing institutnya. Dari fenomena dan deskripsi di atas, peneliti akan menganalisis dan merumuskan penelitian dengan pendekatan interdisipliner, dengan mengangkat judul "Moderasi Beragama Berbasis Humanisme Religius untuk Menyikapi Politik Identitas bagi Mahasantri di Perguruan Tinggi Pesantren Jember."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman fenomena yang terjadi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap paling relevan dengan topik yang diteliti.¹² Data dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu observasi langsung, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan informan yang relevan¹³ dengan pengelola dan mahasantri mahasantri program studi Pendidikan agama islam IAI Al-Qodiri Jember. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam kemudian dianalisis menggunakan metode analisis fenomenologis interpretatif (IPA), yang bertujuan untuk memahami pengalaman dan makna yang diberikan oleh informan terhadap fenomena yang diteliti.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama berbasis humanisme religius dalam menyikapi politik identitas bagi mahasantri Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) IAI Al-Qodiri Jember dilakukan melalui: 1) Integrasi yang kuat antara visi dan misi institusi serta visi misi program studi PAI, 2) Kurikulum, dan 3) Interaksi Sosial.

¹¹ Ritonga and Harahap.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2020).

¹³ Helaluddin, "Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif," 2019, 7.

¹⁴ Helaluddin.

Hasil Penelitian

1. Visi dan Misi

Visi dan misi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan turunan langsung dari visi dan misi institusi IAI Al-Qodiri Jember.¹⁵ Hal ini berarti bahwa visi misi program studi PAI sepenuhnya selaras dengan tujuan dan prinsip yang diusung oleh institusi. Hal ini berarti bahwa visi misi program studi PAI sepenuhnya selaras dengan tujuan dan prinsip yang diusung oleh institusi, dimana keduanya dirancang untuk mencetak lulusan yang berkarakter islami, moderat, serta mampu mengamalkan nilai-nilai agama secara inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penurunan visi dan misi tersebut, Program Studi PAI berkomitmen untuk menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama, tetapi juga mampu mempraktikkan moderasi beragama dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk dalam menghadapi isu-isu seperti politik identitas.

Gerakan pengarusutamaan moderasi Islam dalam penelitian harus dimulai dengan perumusan visi dan misi institusi yang jelas dan konkret. Visi menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, sementara misi merinci langkah-langkah yang perlu diambil untuk merealisasikan visi tersebut. Kedua hal ini harus menjadikan moderasi Islam sebagai bagian integral dari identitas madrasah, bukan sekadar tulisan, tetapi menjadi semangat yang diterapkan dalam setiap aktivitas lembaga. Proses perumusan visi dan misi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan hasilnya harus disosialisasikan dengan baik agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang arah yang ingin dicapai. Dengan demikian, moderasi Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan madrasah, memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan dan hubungan sosial di lingkungan tersebut.

2. Kurikulum

Internalisasi moderasi beragama berbasis humanisme religius dalam menyikapi politik identitas bagi mahasiswa Prodi PAI dilakukan melalui kurikulum yang menekankan inklusivitas, toleransi, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Kurikulum ini bertujuan membentuk pemahaman agama yang seimbang dan moderat, serta menghindari ekstremisme. Mahasiswa dididik untuk menghargai perbedaan, menghindari politik identitas yang memecah-belah, dan menjadi pendidik yang mempromosikan kerukunan serta menjaga stabilitas sosial.

Berdasarkan analisis kurikulum Prodi PAI, didapati bahwa CPL Prodi PAI yang erat kaitannya dengan moderasi beragama berbasis humanisme religius dalam menyikapi politik identitas selain 2 Mata Kuliah (Studi Hadist dan Pendidikan Multikultural) terdapat pada 6 mata kuliah lainnya yakni Akhlak/Tasawuf, Sejarah Peradaban Islam, Tafsir Tarbawi, Filsafat Pendidikan Islam, Sosiologi dan Antropologi Pendidikan dan Tarbiyatul Manaqib.

3. Interaksi Sosial

Berdasarkan observasi dan wawancara didapati bahwa Internalisasi moderasi beragama berbasis humanisme religius dalam menyikapi politik identitas bagi mahasiswa Program

¹⁵ Dokumen.

Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dilakukan melalui interaksi sosial yang konstruktif dan inklusif. Proses ini melibatkan dialog terbuka antara individu dan kelompok, di mana nilai-nilai humanisme religius yang mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan, toleransi, dan keadilan diperkenalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, interaksi sosial bukan hanya sebagai sarana untuk memahami dan merespons perbedaan dalam pandangan keagamaan dan politik identitas, tetapi juga sebagai media untuk membangun kesadaran kritis terhadap bahaya polarisasi sosial.

Melalui interaksi yang sehat dan saling menghormati, mahasiswa dapat diajak untuk menginternalisasi prinsip-prinsip moderasi beragama, yang menghindari ekstremisme dan diskriminasi, serta mempromosikan harmoni sosial di tengah keragaman. Dalam proses ini, pendidikan agama Islam yang berbasis humanisme menjadi kunci untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya paham agama, tetapi juga memiliki pemahaman yang luas tentang pentingnya pluralisme, kebhinekaan, dan kedamaian dalam masyarakat.

Melalui kegiatan seperti Dzikir Manaqib, penggunaan budaya lokal, toleransi, dan pengabdian masyarakat lintas komunitas, mahasiswa diajarkan untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Budaya ini membantu mahasiswa menyikapi politik identitas dengan lebih bijak, mengutamakan kerjasama dan harmoni antaridentitas, serta menghindari perpecahan. Dengan demikian, interaksi sosial dalam konteks moderasi beragama berbasis humanisme religius membantu membangun hubungan yang harmonis antara dosen, pengelola, dan mahasiswa, yang tidak hanya sekadar berinteraksi, tetapi juga saling mempengaruhi dalam hal pemahaman nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan.

Pembahasan

Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama berbasis humanisme religius

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menurut asal katanya, visi berasal dari bahasa Inggris "vision" yang memiliki makna kemampuan melihat, impian, atau gambaran akan masa depan. Secara etimologis, visi juga merujuk pada sebuah pandangan yang mendalam dan jelas untuk mencapai sesuatu di masa depan. Visi adalah kemampuan memahami inti dari suatu masalah. Dengan kata lain, visi seringkali diungkapkan dalam bentuk singkat, padat, dan jelas, namun tetap mencakup harapan, impian, serta cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di masa mendatang.¹⁶ Menurut Wibisono, visi dapat berupa kata atau kalimat yang melukiskan mimpi, aspirasi, rencana, serta harapan suatu organisasi, perusahaan, atau asosiasi untuk masa depan. Visi juga menggambarkan kebutuhan fundamental yang diperlukan suatu organisasi guna menjamin keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjangnya.¹⁷ Oleh sebab itu, visi mencerminkan

¹⁶ Muh Minan, "PRAKTIK KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (October 29, 2019): 177-96, <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i1.53>.

¹⁷ Rio Hariwibowo, "Analisis Visi Dan Misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman," *KINERJA* 15, no. 2 (August 26, 2018): 76, <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4035>.

sesuatu yang diidamkan oleh organisasi untuk mencapai kesuksesan dan kelangsungan hidup jangka panjang. Visi juga berperan penting dalam menginspirasi dan memotivasi setiap anggota lembaga dalam mewujudkan gagasan dan tujuan bersama, serta menjadi pendorong bagi pencapaian prestasi yang tercermin melalui layanan yang diberikan, nilai-nilai yang diperoleh, serta harapan masa depan. Dalam konteks pendidikan, visi menggambarkan identitas institusi yang ingin dicapai di masa depan, dengan memperhitungkan berbagai tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi. Pengembangan visi untuk lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan kemajuan yang akan terjadi di masa depan.¹⁸

Visi sebuah institusi mencerminkan gambaran ideal tentang tujuan dan arah yang ingin dicapai di masa depan. Sebagai konsep moral, visi ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai refleksi dari harapan dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Dalam merumuskan visi, institusi harus memperhitungkan berbagai peluang yang ada, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul, terutama dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Oleh karena itu, visi yang disusun perlu mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang akan terjadi, agar tetap relevan dan mampu memberikan arahan yang jelas bagi institusi dalam mencapai tujuannya di masa depan.¹⁹

Visi dalam sebuah institusi juga merupakan proyeksi masa depan yang ingin dicapai, dan dalam merumuskan visi tersebut, penting untuk mempertimbangkan tantangan serta perkembangan yang akan datang. Visi lembaga memiliki peran krusial dan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat mendefinisikannya. Pertama, visi harus menggambarkan tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai di masa depan, serta mendukung kemampuan manajerial untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selaras dengan Visi Pendidikan Nasional. Kedua, pencapaian visi membutuhkan rentang waktu yang panjang dengan batasan yang jelas, yang bertujuan memfokuskan kegiatan pendidikan pada tujuan bersama. Ketiga, visi harus menekankan kualitas dan karakter siswa, menghindari orientasi komersial, dan memastikan pendidikan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Keempat, visi perlu melibatkan semua anggota lembaga, bukan hanya manajemen puncak, agar visi yang terbentuk mencerminkan konsensus dan komitmen bersama. Terakhir, pernyataan visi harus disusun secara singkat dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh seluruh anggota lembaga dan masyarakat luas.²⁰

Menurut Akdon, dalam merumuskan sebuah visi, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, visi harus menjadi gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan, bukan hanya mencerminkan kondisi atau fakta yang ada saat ini. Visi harus dapat menggambarkan tujuan jangka panjang yang lebih besar, mencerminkan harapan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau institusi di masa depan. Kedua, visi

¹⁸ Fadillah Windaningrum, "Analisis Relevansi Visi, Misi, Tujuan, Dan Kurikulum Antara SMKN 1 Kedawung Sragen Dan SMKN 1 Bawen Semarang," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 2 (December 13, 2019): 123-40, <https://doi.org/10.35905/alishlah.v17i2.1017>.

¹⁹ Muhammad Hamzah Al Faruq and Supriyanto Supriyanto, "Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Guru," *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (October 3, 2020): 68, <https://doi.org/10.26740/jdmp.v5n1.p68-76>.

²⁰ Citra Anisa and Rahmatullah Rahmatullah, "Visi Dan Misi Menurut Fred R. David Perspektif Pendidikan Islam," *Journal EVALUASI* 4, no. 1 (March 7, 2020): 70, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i1.356>.

berfungsi sebagai panduan bagi anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal. Ketiga, visi harus mampu menginspirasi dan siap menghadapi berbagai tantangan. Keempat, visi berperan sebagai penghubung antara kondisi saat ini dan masa depan yang diharapkan. Kelima, visi harus menggambarkan masa depan yang realistis, dapat diandalkan, dan menyenangkan. Terakhir, visi bersifat dinamis, bukan sesuatu yang statis atau tetap, melainkan akan terus relevan seiring waktu.²¹

Mengembangkan visi institusi yang baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, memerlukan perhatian pada beberapa aspek penting.²² Pertama, visi harus memiliki jangka waktu panjang dan fokus pada masa depan, dengan kerangka waktu yang disesuaikan dengan perkembangan yang diharapkan. Kedua, visi perlu mencerminkan keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik, sejalan dengan norma dan harapan yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga, visi harus menggambarkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh institusi tersebut. Keempat, visi harus mampu menginspirasi, membangkitkan antusiasme, dan memperkuat komitmen dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan hingga staf dan siswa

Kelima, visi harus menjadi landasan yang mendorong transformasi dan pengembangan institusi ke arah yang lebih baik, baik dalam hal kualitas pendidikan maupun dalam pengelolaan sumber daya. Visi yang jelas dan terarah dapat memberikan motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi, sehingga institusi dapat beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Keenam, visi juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan misi dan tujuan yang lebih spesifik untuk mencapai visi tersebut. Terakhir, dalam proses pengembangan visi, penting untuk menetapkan indikator yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi sejauh mana visi itu tercapai, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan menuju tujuan yang diinginkan.

b. Misi

Misi berfungsi sebagai pelengkap visi dengan menjabarkannya ke dalam bentuk tugas, komitmen, dan rencana aksi yang jelas. Secara sederhana, misi menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh suatu lembaga untuk mencapai visinya. Misi memberikan langkah-langkah konkret yang perlu diambil serta panduan tentang cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Imam Machali dan Ara Hidayat,²³ misi mencakup berbagai kegiatan yang perlu dilakukan oleh sekolah atau madrasah dalam menjalankan fungsinya, agar visi yang telah ditetapkan bisa tercapai. Sementara itu, Aminatul Zahroh,²⁴ menegaskan bahwa misi harus mencakup langkah-langkah strategis dan efektif untuk mencapai visi yang diinginkan. Edward Salis²⁵ menekankan bahwa pernyataan misi sangat terkait dengan visi, karena misi

²¹ Ahmad Calam dan Qurniati A, "Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Sainik* 15, no. 1 (2016).

²² Ahmad Calam dan Qurniati A.

²³ Nurul Hidayati, "KONSEP INTEGRASI TRIPUSAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMAJUAN MASYARAKAT," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11, no. 1 (March 27, 2016): 261, <https://doi.org/10.21043/edukasia.v11i1.811>.

²⁴ Aminatul Zahro, *Total Quality Managemen Teori Dan Praktek Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Arruzzmedia, 2014), 55.

²⁵ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education : Manajemen Mutu Pendidikan*, Cet.16 (Yogyakarta: Ircisod, 2012), 216.

memberikan arah yang jelas, baik untuk masa kini maupun masa depan. Dalam dunia pendidikan, misi memiliki peran yang sangat vital. Misi harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah strategis yang konkret untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam institusi, sambil memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tetap sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan jangka panjang dapat tercapai dengan efektif.

Misi berfungsi sebagai penjabaran konkret dari visi, yang menguraikan langkah-langkah praktis, komitmen, dan rencana aksi yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Secara lebih spesifik, misi menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh lembaga untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, misi ini mencakup serangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan visi yang diinginkan. Misi menjadi pedoman operasional yang memandu setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga dalam mencapai tujuannya, dan harus disusun dengan cara yang realistis dan dapat diukur untuk memastikan pencapaian visi yang telah disusun.²⁶

Aminatul Zahro²⁷ Misi dapat dipahami sebagai serangkaian langkah strategis dan terencana yang dirancang untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi berfungsi sebagai rencana aksi yang konkret dan terarah, yang membantu lembaga untuk melaksanakan tujuan jangka panjang yang digambarkan dalam visi. Dalam hal ini, misi memberikan panduan praktis yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa visi dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh lembaga harus sejalan dengan misi ini, untuk memastikan bahwa tujuan besar yang ditetapkan dalam visi dapat diwujudkan. Misi tidak hanya berfokus pada apa yang perlu dilakukan, tetapi juga bagaimana langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat, memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Dengan demikian, misi memainkan peran penting dalam menyelaraskan seluruh aktivitas dan sumber daya lembaga menuju pencapaian visi yang lebih besar.

Edward menjelaskan²⁸ bahwa pernyataan misi sangat erat kaitannya dengan visi dan memberikan arah yang jelas, baik untuk masa kini maupun masa depan. Saat ini, pernyataan misi menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Misi harus dapat diterjemahkan menjadi langkah-langkah kunci yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang di dalam institusi, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selaras dengan visi yang telah ditetapkan.

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan, misi dapat dipahami sebagai pernyataan yang merinci langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Secara singkat, misi merupakan panduan yang berisi instruksi atau tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi yang diinginkan. Jika dikaitkan dengan tanggung jawab suatu lembaga,

²⁶ Imam Machali dan Ara Hidayat, *The Handbook Of Education Managemen Teori Dan Praktik Pengolahan Sekolah/Madrasah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).

²⁷ Aminatul Zahro, *Total Quality Managemen Teori Dan Praktek Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Arruzzmedia, 2014).

²⁸ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education : Manajemen Mutu Pendidikan*, Cet.16 (Yogyakarta: Ircisod, 2012).

misi dapat diartikan sebagai pernyataan yang mencakup kegiatan atau langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh lembaga tersebut untuk merealisasikan visinya. Misi ini berfungsi sebagai arah atau pedoman bagi lembaga dalam melaksanakan tugas dan komitmen yang diperlukan guna mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam visi.²⁹

Misi merupakan tindakan atau langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah penjabaran visi dalam bentuk perumusan tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang akan dijalankan. Dalam merumuskan misi, terdapat beberapa kriteria penting yang harus diperhatikan: 1) Produk atau layanan yang ditawarkan harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, agar relevan dan bermanfaat. 2) Target audiens harus jelas dan dapat dicapai, memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan pasar. 3) Produk dan layanan harus berkualitas tinggi serta kompetitif untuk menarik perhatian publik dan memastikan keberlanjutan. 4) Penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai di masa depan harus memberikan kenyamanan dan manfaat bagi produk serta komunitas yang dilayani, dengan tetap menjaga visi jangka panjang.³⁰

Dalam merumuskan misi institusi, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan: 1) Pernyataan misi harus disampaikan dengan jelas dan spesifik mengenai apa yang ingin dicapai oleh institusi, agar tujuan yang ingin diwujudkan dapat dipahami dengan baik. 2) Misi harus dirumuskan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan "tindakan" atau langkah nyata yang akan diambil, bukan hanya sekadar menggambarkan "kondisi" seperti pada visi. 3) Indikator pencapaian misi dapat diperjelas dengan membuat kaitan yang jelas antara indikator visi dan misi, sehingga ada kesinambungan yang mudah dipahami antara tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis yang akan diambil. 4) Misi institusi harus menjelaskan produk atau layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta siapa yang menjadi penerima manfaat dari layanan tersebut, untuk memastikan bahwa tujuan yang dicanangkan benar-benar relevan dengan kebutuhan publik. 5) Produk atau jasa yang ditawarkan harus memiliki kualitas tinggi, kompetitif, serta dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan institusi, agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.³¹

Misi biasanya mencerminkan nilai-nilai dan prioritas yang mendasari keputusan strategis, serta menguraikan visi dan arah masa depan organisasi. Tujuan dari pernyataan misi adalah untuk memastikan bahwa perilaku dan tindakan yang direncanakan sejalan dengan panduan misi, serta menjelaskan alasan keberadaan dan tujuan organisasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Dari sudut pandang pelanggan, pernyataan misi memberikan kerangka harapan yang jelas bagi karyawan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memahami bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk kebaikan bersama, baik bagi

²⁹ Sutrimo Purnomo, "PENGEMBANGAN SASARAN, VISI DAN MISI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS KEPUASAN PELANGGAN," *Jurnal Kependidikan* 3, no. 2 (February 17, 2017): 52-69, <https://doi.org/10.24090/jk.v3i2.899>.

³⁰ Ela Nurlala and Dindin Solahudin, "Manajemen Pelatihan Dasar Kepemimpinan Santri Dalam Pembentukan Jiwa Kepemimpinan," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (March 30, 2016): 85-101, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i1.129>.

³¹ Ahmad Calam dan Qurniati A, "Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan."

karyawan, pelanggan, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, misi tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga alat komunikasi yang memperkuat hubungan dan keterikatan antara organisasi dengan semua pihak yang terlibat.³²

Merumuskan visi dan misi sering kali menjadi proses yang kompleks dan melelahkan, serta sering memicu perdebatan di antara para pemimpin institusi. Namun, setelah visi dan misi berhasil dirumuskan, sering kali implementasinya tidak berjalan optimal. Jika visi dan misi yang dirumuskan dengan susah payah hanya berakhir sebagai hiasan di dinding tanpa penerapan nyata, hal ini tentu sangat mengecewakan. Ketika visi dan misi organisasi tidak menggambarkan tujuan organisasi dengan tepat, akan muncul tantangan dalam menerjemahkannya menjadi serangkaian tindakan nyata yang bisa diukur. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah *Balanced Scorecard*, namun jika visi dan misi tidak diintegrasikan dengan baik ke dalam tindakan tersebut, pengukurannya menjadi tidak efektif.

Visi dan misi yang dirumuskan dengan baik merupakan fondasi penting bagi setiap institusi, termasuk lembaga pendidikan seperti Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAI Al-Qodiri Jember, terutama dalam menghadapi tantangan politik identitas. Dalam konteks moderasi beragama berbasis humanisme, visi dan misi berperan penting untuk membimbing lembaga pendidikan dalam membentuk individu yang mampu bersikap inklusif, toleran, dan adil dalam menyikapi perbedaan.

Visi yang berfokus pada moderasi beragama harus mencerminkan harapan masa depan yang lebih baik, di mana nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman diimplementasikan secara nyata. Ini sejalan dengan cita-cita ideal organisasi yang bertujuan mencetak lulusan berkarakter islami yang mampu menghadapi tantangan politik identitas dengan bijak. Di sisi lain, misi perlu diorientasikan pada langkah-langkah konkret untuk mengembangkan sikap moderasi, seperti menyusun kurikulum, pelatihan, dan kegiatan yang mempromosikan dialog lintas budaya dan agama.

Dalam konteks politik identitas, visi dan misi yang berlandaskan pada moderasi beragama berbasis humanisme akan menjadi pedoman taktis bagi lembaga dalam menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Melalui visi yang jelas dan misi yang terukur, lembaga dapat memastikan bahwa nilai-nilai moderasi tidak hanya menjadi sekadar retorika, tetapi diimplementasikan dalam praktik sehari-hari melalui pendidikan yang membentuk pemahaman kritis terhadap isu-isu perpecahan. Implementasi yang tepat ini dapat diukur dengan metode seperti *Balanced Scorecard*, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung keberhasilan jangka panjang dalam membangun individu dan masyarakat yang mampu menghadapi tantangan politik identitas dengan kedewasaan, toleransi, dan kemanusiaan.

2. Kurikulum

Internalisasi moderasi beragama berbasis humanisme religius dalam menyikapi politik identitas bagi mahasiswa Prodi PAI dilakukan melalui kurikulum yang menekankan inklusivitas,

³² Ana Čuić Tanković, "Defining Strategy Using Vision and Mission Statements of Croatian Organizations In Times Of Crisis," *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 26, no. sup1 (January 9, 2013): 331-42, <https://doi.org/10.1080/1331677X.2013.11517655>.

toleransi, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Kurikulum ini bertujuan membentuk pemahaman agama yang seimbang dan moderat, serta menghindari ekstremisme. Mahasiswa dididik untuk menghargai perbedaan, menghindari politik identitas yang memecah-belah, dan menjadi pendidik yang mempromosikan kerukunan serta menjaga stabilitas sosial.

Kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan, karena di antara berbagai bidang pendidikan seperti manajemen pendidikan, kurikulum, dan layanan siswa, kurikulumlah yang paling mempengaruhi hasil pendidikan. Dalam pengembangannya, kurikulum dapat dibedakan menjadi dua aspek utama: pertama, desain kurikulum atau kurikulum tertulis, yang mencakup dokumen resmi, rancangan formal, atau struktur kurikulum yang disusun sebelumnya. Kedua, implementasi kurikulum, yang melibatkan penerapan langsung dari kurikulum tersebut dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dan lingkungan pendidikan lainnya. Desain kurikulum menetapkan apa yang seharusnya diajarkan, sementara implementasi kurikulum mencakup bagaimana materi tersebut diajarkan dan diterima oleh siswa dalam praktiknya. Kedua aspek ini saling terkait dan sama pentingnya dalam memastikan keberhasilan proses pendidikan.³³

Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAI Al-Qodiri Jember dirancang dengan mengacu pada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai pedoman utama dalam pengembangannya. Kurikulum ini mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mendefinisikan kurikulum sebagai "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran (CP) lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi (Prodi)." Oleh karena itu, kurikulum PAI di IAI Al-Qodiri Jember mencakup perencanaan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, termasuk pengaturan materi ajar, metode pembelajaran yang digunakan, serta evaluasi pembelajaran, yang semuanya disusun agar sesuai dengan standar nasional yang berlaku dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia kerja yang terus berkembang.³⁴

Moderasi beragama tercermin dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi PAI yang kemudian memunculkan mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) melalui berbagai aspek yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan sikap inklusif, toleran, dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan. CPMK ini semacam target atau hasil yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah tertentu. Dengan begitu, setiap mata kuliah punya peran penting dalam mendukung tercapainya CPL yang lebih besar. Berdasarkan analisis dokumen kurikulum Prodi PAI, CPL Prodi PAI meliputi pemahaman mendalam tentang agama secara moderat, kemampuan untuk menghargai keragaman, serta sikap adil dalam menyikapi berbagai isu sosial, termasuk politik identitas.

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*. (Makalah Dalam Lokakarya Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2003).

³⁴ Permenristekdikti 44 Tahun 2015, "Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi" (Jakarta, 2015).

Menurut³⁵ dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), terdapat beberapa langkah penting yang harus diikuti. Langkah-langkah ini sangat relevan jika dikaitkan dengan moderasi beragama berbasis humanisme religius, terutama dalam menghadapi isu politik identitas di tengah masyarakat:

Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah merumuskan Profil Lulusan, yang menggambarkan sosok ideal lulusan program studi, termasuk bagaimana lulusan tersebut dapat berperan dalam masyarakat. Dalam konteks moderasi beragama berbasis humanisme religius, profil lulusan harus mencerminkan individu yang moderat, inklusif, dan toleran terhadap perbedaan, serta mampu bersikap adil dalam menghadapi politik identitas yang sering kali memecah belah. Lulusan harus siap menjadi agen perubahan yang mendorong kerukunan dan harmoni dalam masyarakat yang beragam.

Langkah kedua adalah menetapkan Capaian Pembelajaran, yang meliputi unsur sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan tanggung jawab. Dalam hal ini, capaian pembelajaran harus menekankan sikap moderat, menghargai perbedaan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan juga harus mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, politik identitas, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara keyakinan agama dan kehidupan bernegara.

Langkah ketiga adalah memilih dan menetapkan Bahan Kajian yang relevan, yang mencakup ilmu pengetahuan inti, pendukung, dan pelengkap. Dalam konteks moderasi beragama, bahan kajian yang dipilih harus mencakup studi-studi agama yang menekankan pluralisme, dialog antaragama, serta pentingnya pendekatan humanis dalam menyikapi perbedaan identitas di tengah masyarakat. Selain itu, bahan kajian juga harus disesuaikan dengan tantangan masa depan, termasuk kebutuhan dunia kerja dan profesional yang menuntut sikap inklusif dan humanis dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial.

Langkah keempat adalah menetapkan Mata Kuliah yang akan diajarkan dalam program studi. Mata kuliah yang dirancang harus mencakup topik-topik seperti moderasi beragama, etika sosial, dan kebijakan publik yang berkaitan dengan politik identitas. Mata kuliah ini harus dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berperan sebagai pemimpin yang bijak dan moderat di masa depan, yang mampu menjaga keseimbangan antara keyakinan agama dan tuntutan sosial yang kompleks.

Dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan kurikulum yang sistematis dan terarah, program studi dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki karakter moderat dan humanis dalam menyikapi isu-isu sensitif seperti politik identitas. Hal ini akan memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan untuk mengamalkan moderasi beragama berbasis humanisme religius dan berkontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

³⁵ Syfruddin Nurdin, "Pengembangan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNI Di Perguruan Tinggi," *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 3, 2019): 140-47, <https://doi.org/10.15548/mrb.v1i2.305>.

3. Interaksi Sosial

Interaksi sosial berasal dari kata Latin "Con" atau "Cum" yang berarti bersama-sama, dan "tango" yang berarti menyentuh. Secara harfiah, interaksi sosial dapat diartikan sebagai "bersama-sama menyentuh." Konsep ini merujuk pada proses di mana individu berhubungan dengan individu lain, kelompok dengan individu, atau kelompok dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial merupakan bentuk komunikasi yang saling memengaruhi, di mana setiap pihak bereaksi terhadap tindakan atau ucapan orang lain, menciptakan hubungan dinamis antara mereka.

Menurut Nasdian, interaksi sosial adalah intensitas yang mengatur perilaku masyarakat dalam berhubungan satu sama lain, yang pada gilirannya menjadi dasar terbentuknya hubungan sosial dan struktur sosial dalam suatu komunitas. Proses ini tidak hanya membentuk hubungan antarindividu, tetapi juga membangun struktur sosial yang lebih besar. Melalui interaksi sosial, nilai-nilai, norma, dan budaya suatu kelompok dapat dipertahankan dan diperbaharui, menciptakan dinamika sosial yang terus berkembang sesuai dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat.³⁶

Elly menambahkan³⁷ bahwa interaksi sosial melibatkan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, yang saling mempengaruhi dan membentuk dinamika sosial dalam masyarakat. Jack mempertegas³⁸ bahwa interaksi sosial memerlukan efek timbal balik di mana dua atau lebih objek saling mempengaruhi. Orientasi bersama sangat penting dalam interaksi, dan tindakan yang tidak disadari oleh pihak lain, seperti memata-matai, tidak dapat disebut sebagai interaksi sosial. Dalam konteks ini, interaksi sosial juga sering diposisikan sejajar dengan proses sosial karena keduanya mencakup saling pengaruh di antara pihak-pihak yang terlibat

Menurut Soerjono Soekanto³⁹, interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktivitas sosial, karena tanpa adanya interaksi antara individu atau kelompok, aktivitas sosial tersebut tidak akan mungkin berlangsung. Interaksi sosial adalah proses dasar yang memungkinkan hubungan antarindividu atau kelompok berkembang dan membentuk struktur sosial yang lebih besar. Soerjono menekankan bahwa kegiatan sosial yang kita lakukan sehari-hari baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, tempat kerja, atau di ranah lainnya hanya bisa terwujud jika ada proses komunikasi dan pertukaran antara individu yang saling berinteraksi. Tanpa interaksi, meskipun individu memiliki kebutuhan atau kepentingan yang sama, tidak akan ada cara untuk mencapainya atau untuk menciptakan hubungan sosial yang produktif.

Sementara itu, Bonner menyatakan bahwa interaksi sosial melibatkan hubungan antara dua orang atau lebih, di mana perilaku salah satu pihak dapat mempengaruhi, mengubah, atau bahkan memperbaiki perilaku pihak lain, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, interaksi sosial bukan hanya sekadar pertukaran pesan atau informasi, tetapi juga proses timbal balik yang memungkinkan adanya perubahan dalam sikap, pandangan, atau perilaku individu yang terlibat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh suatu interaksi

³⁶ Lalu Moh. Fahri & Lalu A. Hery Qusyairi, "Interaksi Sosial Dalam Proses Pembelajaran," *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2019).

³⁷ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Prenada, 2011).

³⁸ M. Jack, *Sosiologi: Konsep, Teori, Dan Metode* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).

terhadap individu yang terlibat di dalamnya. Misalnya, dalam sebuah diskusi kelompok, satu individu mungkin dapat mempengaruhi pandangan orang lain, dan sebaliknya, pandangan orang lain juga dapat memperkaya atau mengubah cara berpikir individu pertama. Interaksi ini mengarah pada pembentukan pemahaman bersama dan pembentukan norma-norma sosial dalam kelompok.

Kimball Young dan Raymond W. Mack⁴⁰ juga menegaskan bahwa interaksi sosial adalah kunci dari semua bentuk kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi, kehidupan bersama tidak akan terbentuk. Mereka menambahkan bahwa interaksi sosial membentuk dasar dari semua struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Tanpa interaksi, masyarakat tidak akan memiliki sistem, nilai, norma, atau bahkan hubungan antarindividu yang memungkinkan terjadinya kohesi sosial. Misalnya, dalam masyarakat modern, berbagai kegiatan sosial, seperti pendidikan, ekonomi, dan politik, semuanya bergantung pada interaksi sosial yang efektif antara individu atau kelompok. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun dan memelihara keharmonisan sosial dalam suatu masyarakat, serta sebagai landasan untuk menciptakan perubahan sosial yang konstruktif dan berkelanjutan.

Dari berbagai pandangan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang melibatkan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memainkan peran aktif. Interaksi sosial ini tidak hanya sekadar hubungan yang sederhana, tetapi melibatkan pengaruh yang saling diberikan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, interaksi sosial berbeda dengan kelompok sosial dan dapat dibagi menjadi berbagai jenis, tergantung pada bentuk dan intensitas hubungan yang terjadi antara individu atau kelompok.

Cycle Park membagi interaksi sosial menjadi lima tahap yang menggambarkan dinamika hubungan antar individu atau kelompok dalam proses sosial. Tahap pertama adalah kontak awal, yang merujuk pada interaksi pertama antara individu atau kelompok yang belum saling mengenal. Tahap ini penting karena menjadi dasar dari hubungan sosial yang akan berkembang lebih lanjut. Setelah itu, dalam proses interaksi, sering kali muncul kompetisi, yaitu persaingan antara individu atau kelompok yang berusaha mencapai tujuan yang sama. Kompetisi ini bisa berlanjut menjadi konflik, di mana ketegangan atau pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat semakin meningkat dan mengarah pada konflik terbuka.

Setelah konflik, tahap berikutnya adalah akomodasi, yang merujuk pada proses penyesuaian atau penyelesaian perbedaan antara individu atau kelompok. Akomodasi bertujuan untuk meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama, meskipun mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan semua masalah. Tahap terakhir adalah asimilasi, yang terjadi ketika kelompok minoritas akhirnya dapat berintegrasi dengan kelompok mayoritas yang dominan, menciptakan harmoni dan keseragaman dalam hubungan sosial. Proses asimilasi ini penting untuk menciptakan kesatuan sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Sementara itu, Soekanto⁴¹ membagi interaksi sosial menjadi empat bentuk utama yang lebih umum, yaitu kerja sama (cooperation), persaingan (competition), akomodasi

⁴⁰ Soerjono Soekanto.

⁴¹ Soerjono Soekanto.

(accommodation), dan pertentangan (conflict). Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kerja kelompok hingga kolaborasi antara organisasi atau masyarakat. Persaingan terjadi ketika individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan yang sama, namun dengan cara atau metode yang berbeda, yang sering kali mengarah pada upaya untuk mengungguli pihak lain. Akomodasi adalah proses penyesuaian atau penyelesaian perbedaan yang memungkinkan tercapainya kesepakatan atau kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan pertentangan atau konflik terjadi ketika perbedaan pendapat atau tujuan antara individu atau kelompok tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dan menimbulkan ketegangan atau perpecahan. Konflik ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mengarah pada perubahan sosial yang lebih besar jika tidak dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, baik tahap yang dikemukakan oleh Cycle Park maupun pembagian yang diungkapkan oleh Soekanto, menggambarkan betapa pentingnya dinamika interaksi sosial dalam membentuk struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Proses sosial ini tidak selalu berjalan mulus, tetapi melalui kerja sama, persaingan, akomodasi, dan bahkan konflik, masyarakat dapat berkembang dan menemukan solusi atas perbedaan yang ada.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Gillin dan Gillin, sebagaimana dikutip oleh Soekanto, membagi interaksi sosial menjadi dua kategori besar: interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif mencakup kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, yang semuanya melibatkan proses penyatuan atau pengharmonisan antar individu atau kelompok. Sebaliknya, interaksi sosial disosiatif melibatkan bentuk-bentuk hubungan yang lebih bersifat pemisahan atau pertentangan, seperti persaingan, kontravensi, dan konflik.

Setiadi dan Kolip⁴² juga membagi interaksi sosial menjadi dua bentuk utama, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. a) Proses sosial asosiatif: Proses ini melibatkan bentuk-bentuk interaksi yang cenderung mengarah pada kesepakatan, penyatuan, atau pengharmonisan antar individu atau kelompok. Bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori ini adalah: Kerjasama (cooperation): Proses di mana individu atau kelompok bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, Akomodasi (accommodation): Proses penyesuaian diri untuk mengurangi konflik dan menciptakan perdamaian di antara individu atau kelompok dan Asimilasi (assimilation): Proses integrasi berbagai kelompok dengan perbedaan budaya menjadi satu kesatuan yang lebih homogen.

b) Proses sosial disosiatif: Proses ini melibatkan bentuk-bentuk interaksi yang cenderung mengarah pada perpecahan atau pertentangan antara individu atau kelompok. Bentuk-bentuk yang termasuk dalam kategori ini adalah: Persaingan (competition): Proses di mana individu atau kelompok bersaing untuk mencapai tujuan yang sama, namun tidak ada pihak yang secara langsung merugikan pihak lain, Kontravensi (contravention): Bentuk interaksi sosial di mana terdapat pelanggaran terhadap norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan Pertentangan (conflict): Proses sosial yang melibatkan pertikaian atau ketegangan antara individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang saling bertentangan. Pembagian ini

⁴² Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*.

menekankan bagaimana proses sosial dalam interaksi dapat mengarah pada penyatuan atau perpecahan, tergantung pada sifat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks moderasi beragama berbasis humanisme religius, interaksi sosial antara dosen atau pengelola dengan mahasiswa memainkan peran penting dalam menyikapi politik identitas. Interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa dapat berbentuk kerjasama dalam mendiskusikan dan memahami nilai-nilai moderasi beragama, yang mengutamakan dialog dan toleransi. Dalam proses ini, dosen berperan sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya menghargai perbedaan dan mencegah polarisasi akibat politik identitas.

Selain kerjasama, bentuk interaksi lain seperti persaingan dan pertentangan juga dapat terjadi, terutama dalam situasi di mana mahasiswa menghadapi berbagai pandangan dan ideologi. Namun, dengan moderasi beragama yang berbasis humanisme religius, interaksi ini diharapkan dapat diakomodasi melalui proses dialog yang konstruktif, sehingga konflik atau perselisihan dapat diminimalisir. Akomodasi dan asimilasi menjadi bagian dari proses sosial di mana dosen dan mahasiswa dapat saling memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam kehidupan sosial mereka, sehingga tercipta harmoni dalam menyikapi politik identitas yang kerap kali menjadi isu sensitif di masyarakat.

Melalui kegiatan seperti Dzikir *Manaqib*, penggunaan budaya lokal, toleransi, dan pengabdian masyarakat lintas komunitas, mahasiswa diajarkan untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Budaya ini membantu mahasiswa menyikapi politik identitas dengan lebih bijak, mengutamakan kerjasama dan harmoni antaridentitas, serta menghindari perpecahan. Dengan demikian, interaksi sosial dalam konteks moderasi beragama berbasis humanisme religius membantu membangun hubungan yang harmonis antara dosen, pengelola, dan mahasiswa, yang tidak hanya sekadar berinteraksi, tetapi juga saling mempengaruhi dalam hal pemahaman nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan.

KESIMPULAN

Artikel ini membahas pentingnya penerapan moderasi beragama berbasis humanisme keagamaan sebagai pendekatan untuk menangani politik identitas di kalangan mahasiswa di Perguruan Tinggi Pesantren Jember. Penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dilakukan melalui visi dan misi institusi, kurikulum pendidikan, dan interaksi sosial. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diajarkan untuk mengamalkan sikap inklusif, toleran, serta menghargai keberagaman dalam konteks sosial dan politik, sehingga dapat menghindari efek negatif dari identitas politik yang dapat memecah belah masyarakat. Moderasi ini juga ditekankan melalui pembelajaran yang menyeimbangkan antara keyakinan agama dengan kehidupan bernegara, mendorong kerukunan, serta membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Penelitian ini terbatas hanya pada kajian internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, peneliti menganggap bahwa perlu dilakukan penelitian lanjutan yakni terkait implementasi atau hingga penelitian bentuk habitus mahasiswa PTS nilai-nilai moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Calam dan Qurniati A. "Merumuskan Visi Dan Misi Lembaga Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Saindik* 15, no. 1 (2016).
- Aminatul Zahro. *Total Quality Managemen Teori Dan Praktek Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidkan*. Yogyakarta: Arruzzmedia, 2014.
- Anang Dony Irawan, None, None Lady Nur Adibah, and None Dyonny Infans Viri Toniek. "Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia." *Pacivic Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023): 11–21. <https://doi.org/10.36456/p.v3i1.7191>.
- Anisa, Citra, and Rahmatullah Rahmatullah. "Visi Dan Misi Menurut Fred R. David Perspektif Pendidikan Islam." *Journal EVALUASI* 4, no. 1 (March 7, 2020): 70. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i1.356>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*,. Jakarta: Reneka Cipta, 2020.
- Edward Sallis. *Total Quality Management in Education : Manajemen Mutu Pendidikan*. Cet.16. Yogyakarta: Ircisod, 2012.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenada, 2011.
- Faruq, Muhammad Hamzah Al, and Supriyanto Supriyanto. "Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Guru." *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (October 3, 2020): 68. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v5n1.p68-76>.
- Firdaus, Fauzan Akmal, and Husni Husni. "Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Pesantren Dalam Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas." *Tsamratul Fikri | Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2021): 83. <https://doi.org/10.36667/tf.v15i1.703>.
- Hariwibowo, Rio. "Analisis Visi Dan Misi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman." *KINERJA* 15, no. 2 (August 26, 2018): 76. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4035>.
- Helaluddin. "Mengenal Lebih Dekat Dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitratif," 7, 2019.
- Hutabarat, Dany Try Utama, Ajeng Alda Sari, Anggun Wella, Anzas Elfindra, Firman Febrian Lubis, Faras Musyarih MHD, Fadillah Asmuni MPR, and Siti Rahmadani. "Pendidikan Pancasila: Negara, Agama, Dan Warga Negara." *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i1.202>.
- Imam Machali dan Ara Hidayat. *The Handbook Of Education Managemen Teori Dan Praktik Pengolahan Sekolah/Madrasah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Lalu Moh. Fahri & Lalu A. Hery Qusyairi. "Interaksi Sosial Dalam Proses Pembelajaran." *PALAPA : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 7, no. 1 (2019).
- M. Jack. *Sosiologi: Konsep, Teori, Dan Metode*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Mahpudin. "Kebangkitan Politik Identitas Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Sosial Politik* 7, no. 2 (2021): 148–60. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>.
- Minan, Muh. "PRAKTIK KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU PERSPEKTIF AL-

- QUR'AN." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (October 29, 2019): 177-96. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i1.53>.
- Muhamad Syaikhul Alim, Achmad Munib. "Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Madrasah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim* 9, no. 2 (2021).
- Mukhoyyaroh, Nurul Badi', and Iskandar Yusuf. 2024. "Implementasi Pendidikan Karakter Kemandirian Di Ponpes Terpadu Al-Mujahidin Balikpapan". *Journal of Educational Research and Practice* 2 (1). Tulungagung, Indonesia:30-38. <https://doi.org/10.70376/jerp.v2i1.88>.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi. (Makalah Dalam Lokakarya Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 2003.
- Nurdin, Syfruddin. "Pengembangan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNI Di Perguruan Tinggi." *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 3, 2019): 140-47. <https://doi.org/10.15548/mrb.v1i2.305>.
- Nurlela, Ela, and Dindin Solahudin. "Manajemen Pelatihan Dasar Kepemimpinan Santri Dalam Pembentukan Jiwa Kepemimpinan." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (March 30, 2016): 85-101. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i1.129>.
- Panjaitan, Firman, and Novi Aling Purba. "Dialog Kehidupan Ayub Memproklamirkan Kemahakuasaan Allah Dalam Bentuk Keadilan Dan Kebenaran." *Jurnal Efata Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 8, no. 1 (2022): 36-48. <https://doi.org/10.47543/efata.v8i1.49>.
- Permenristekdikti 44 Tahun 2015. "Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi." Jakarta, 2015.
- Purnomo, Sutrimo. "PENGEMBANGAN SASARAN, VISI DAN MISI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS KEPUASAN PELANGGAN." *Jurnal Kependidikan* 3, no. 2 (February 17, 2017): 52-69. <https://doi.org/10.24090/jk.v3i2.899>.
- Putra, Bayu Karunia, and Iradhad Taqwa Sihidi. "Keterlibatan Negara Dan Masyarakat Sipil Dalam Proses Menuju Demokratisasi Di Indonesia." *Hukum Responsif* 13, no. 2 (2022): 69. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7360>.
- Ritonga, Muslimin, and Raegen Harahap. "Keterlibatan Selebriti Pasca Parliamentary Threshold Dalam Kontestasi Politik Elektoral Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 3 (2023): 238-45. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3320>.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Tanković, Ana Čuić. "Defining Strategy Using Vision and Mission Statements of Croatian Organizations In Times Of Crisis." *Economic Research-Ekonomska Istraživanja* 26, no. sup1 (January 9, 2013): 331-42. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2013.11517655>.
- Taufiq, Firmada, and Ayu Maulida Alkholid. "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021): 134-47. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>.

Windaningrum, Fadillah. "Analisis Relevansi Visi, Misi, Tujuan, Dan Kurikulum Antara SMKN 1 Kedawung Sragen Dan SMKN 1 Bawen Semarang." *ALISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 17, no. 2 (December 13, 2019): 123-40. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v17i2.1017>.